

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
MINAHASA SELATAN**

Oleh:  
**Ariel Sharon Sumenge**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: arielsharonite@yahoo.com

**ABSTRAK**

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif. Tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah efektif. BAPPEDA Minahasa Selatan menilai ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2008 – 2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.

**Kata kunci:** *efektifitas, efisiensi, anggaran belanja*

**ABSTRACT**

*Public sector organizations are required to pay attention to value for money in the course of their activities. The desired objectives in the implementation of accountability include value for money, which is economical in the procurement and allocation of resources, efficient use of resources in terms of its use is minimized and results are maximized, and effective in terms of achieving the goals and objectives. The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiency of budget execution South Minahasa Regency of BAPPEDA. Analysis of the data used is descriptive analysis. Level and effectiveness criteria of budgets execution South Minahasa of BAPPEDA in 2008 - 2012 highly variable. Highest level of effectiveness in 2010 and the lowest occurred in 2011. Budget execution in 2008, 2009, 2010 and 2012 can be said to have been effective, but in 2011 the level of effectiveness is still lacking due to the realization of the budget have much difference with budget targets. This difference occurs because there are some activities that are budgeted, but not implemented. But for other activities that have been budgeted, is effective. South Minahasa of BAPPEDA assess when the programmed activities are realized and as expected, then the event is said to be effective. Budget execution of BAPPEDA in year 2008-2012, the overall processed efficiently. budget execution in 2008 until 2011, categorized as very efficient, only in 2012 were categorized efficient.*

**Keywords :** *effectiveness, efficiency, budget*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

### Anggaran

Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

### Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Sumarsono (2009:57) penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan dibe4eri masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

### Efektifitas

Mardiasmo (2009:132) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

### Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bisma dan Susanto (2010)	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007	Mengevaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007	Deskriptif. Kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan.	Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah <i>Sangat Tinggi</i> terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah <i>Sangat Kurang</i> . Desentralisasi Fiskal <i>Cukup</i> mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD <i>Sangat Efektif</i> , namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil <i>Tidak Efisien</i> .	Menggunakan metode penelitian deskriptif lalu mengukur efektifitas dan efisiensi dengan menggunakan rasio - rasio	Penelitian sebelumnya tentang keuangan daerah yang didalamnya menghitung rasio kemandirian daerah, Rasio Ketergantungan keuangan daerah, Rasio Desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Sedangkan peneliti hanya menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi
2	Fahrianta dan Carolina (2012)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Menganalisis anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan Kab. Kapuas dengan fokus pada tingkat efisiensi anggaran belanja dinas pendidikan kabupaten Kapuas tahun 2008 – 2010.	Deskriptif	Tingkat/rasio efisiensi anggaran belanja yang dicapai trennya cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dinas pendidikan Kab. Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja	Menggunakan metode penelitian yang sama dan meneliti tingkat atau rasio efisiensi	Penelitian sebelumnya hanya menganalisis tingkat efisiensi sedangkan dalam penelitian ini menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi.



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuncoro (2009:145) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka.

### Tempat dan Waktu

Tempat dilakukannya penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Selatan yang beralamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Pengumpulan data penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Selatan dimulai pada 11 Maret 2013 – 24 April 2013.

### Prosedur Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendefinisikan dan merumuskan masalah, selanjutnya melakukan studi kepustakaan (studi pendahuluan), menentukan model atau desain penelitian, mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan informasi, menganalisis dan menginterpretasikan, dan yang terakhir membuat kesimpulan.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam Sarjanaku.com (2011) memberikan pengertian metode dokumentasi sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Selain itu, digunakan pula metode wawancara dalam pengumpulan data.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2009:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG}}{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan dokumen perencanaan RKP, RPJM dan RPJP Kabupaten Minahasa Selatan;
2. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara Dinas-Dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dengan berkoordinasi Sekretaris Daerah;
5. pengkoordinasian kegiatan kelembagaan penelitian dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah;
6. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan yang bersinergitas dan strategi terhadap pembangunan di daerah;
7. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dalam Skala Daerah dan Nasional baik lembaga pemerintah maupun swasta/masyarakat;
9. Pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah;
10. pelaporan secara berkala dan periodik pelaksanaan pembangunan dari setiap sumber dana seperti APBN tahun berjalan;
11. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dalam perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Bupati.

### Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2008	2.455.739.900	2.174.273.790	88,53	Cukup Efektif
2009	3.483.652.501	3.019.388.229	86,67	Cukup Efektif
2010	2.898.946.000	2.748.621.575	94,81	Efektif
2011	4.152.872.998	2.879.099.644	69,32	Kurang Efektif
2012	7.679.182.941	6.958.550.173	90,61	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Minahasa Selatan (Data Olahan)

Selama periode anggaran tahun 2008 – 2012, tingkat efektifitas anggaran belanja berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami penurunan kadang mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 tingkat efektifitas 88,53% mengalami penurunan di tahun 2009 sebesar 1,86% menjadi 86,67%. Setelah itu mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2010 sebesar 8,14% menjadi 94,81. Pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 25,49 menjadi 69,32. Dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 21,29 menjadi 90,61%. Secara keseluruhan dari tahun 2008 sampai tahun

2012, tingkat efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tren yang berubah-ubah, kadang mengalami peningkatan kadang penurunan. Tahun 2008 dan 2009 tingkat efektifitas masih dalam kategori cukup efektif dan hanya pada tahun 2011 menunjukkan kategori yang kurang efektif, sedangkan tahun 2010 dan 2012 sudah menunjukkan kategori efektif dengan kisaran presentase antara 90% - 100%.

## 2. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2008	1.140.275.075	2.174.273.790	52,44	Sangat Efisien
2009	1.756.504.175	3.019.388.229	58,17	Sangat Efisien
2010	1.267.584.888	2.748.621.575	46,11	Sangat Efisien
2011	1.543.926.750	2.879.099.644	53,62	Sangat Efisien
2012	5.227.807.086	6.958.550.173	75,12	Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Minahasa Selatan (Data Olahan)

Tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa selatan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 tingkat efisiensi sebesar 52,44% menjadi 58,17% pada tahun 2009. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dipandang sebagai penurunan tingkat efisiensi, tetapi masih dalam kriteria yang sangat efisien. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan tingkat efisiensi yang cukup besar sebesar 12,06% menjadi 46,11% dan memiliki kriteria sangat efisien. Pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar 7,51% menjadi 53,62 tetapi masih pada kategori sangat efisien. Pada tahun 2012 juga mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi 75,12% dan masuk dalam kriteria efisien. Secara keseluruhan, anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah efisien dengan tingkat efisiensi dibawah 60% pada tahun 2008 – 2011 yang masuk pada kategori sangat efisien, dan hanya pada tahun 2012 tingkat efisiensi berada di kisaran 60% - 80% yang memiliki kriteria efisien.

## Pembahasan

### 1. Efektifitas Anggaran Belanja BAPPEDA Minahasa Selatan

Pengelolaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kriteria efektifitas yang bervariasi selama tahun 2008 sampai tahun 2012. Pada tahun 2008 dan 2009 tingkat efektifitas dari anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan masih dalam kriteria cukup efektif. Ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2011 dimana tingkat efektifitasnya hanya 69,32% dan dinilai kurang efektif. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran masih terlalu jauh perbedaannya dengan target anggaran. Dan pada tahun 2010 dan 2012, tingkat efektifitas BAPPEDA Minahasa Selatan sudah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. BAPPEDA Minahasa Selatan mengatakan bahwa anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain yang dianggarkan mereka sudah melaksanakannya secara efektif. Mereka mengatakan ketika kegiatan yang mereka programkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikatakan efektif.

### 2. Efisiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Minahasa Selatan

Tingkat efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan sudah sangat bagus, dimana pada tahun 2008 sampai tahun 2011 Anggaran Belanja BAPPEDA Minahasa Selatan memiliki kriteria yang sangat efisien dan hanya pada tahun 2012 yang memiliki kriteria efisien.

Dalam menghitung tingkat efisiensi, berpatokan pada hal biaya. Dimana, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan didalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan, faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan dimasukkan dalam anggaran belanja langsung. Dimana ada beberapa kegiatan yang dianggarkan dan masuk dalam anggaran belanja langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Data / Informasi
- g. Program Perencanaan Tata Ruang
- h. Program Kerjasama Pembangunan
- i. Program Perencanaan Teknis Tata Ruang Kawasan
- j. Program Pemanfaatan Ruang
- k. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
- l. Program Perencanaan Ekonomi
- m. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- n. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- o. Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan pengertian dari efisiensi yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui 15 program yang telah dijalankannya. BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan telah berhasil menggunakan dana yang kecil untuk menjalankan 15 program diatas dan bisa mencapai hasil yang maksimal.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Tingkat dan kriteria efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 sudah bisa dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan, sudah dilaksanakan secara efektif. Minahasa Selatan menilai, ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif.
2. Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 – 2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Dimana anggaran belanja tahun 2008 sampai tahun 2011, dikategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2012 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.

### Saran

Untuk BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan agar lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja di tahun – tahun selanjutnya, dan disarankan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) supaya bisa menilai kinerja yang telah dilakukan dalam satu tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. 2012. *Laporan Realisasi Anggaran tahun 2008-2012*. Minahasa Selatan.
- Bisma, I Dewa Gde., Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus Vol.4, No.3*. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Mataram.
- Fahrianta, Riswan., Carolina, Viani. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.13, No.1*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin.

- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Sarjanaku.com . 2011. *Metode Dokumentasi*.  
<http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode-dokumentasi.html> Tanggal Akses, 08-02-2013
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

